

wonderful  
indonesia



**KEMENTERIAN PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF  
BADAN PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF**

# **LAPORAN KEUANGAN *AUDITED* TAHUN ANGGARAN 2024**

**POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG**

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 DESEMBER 2024

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

Politeknik Pariwisata NHI Bandung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Baparekrif yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bandung, 31 Desember 2024  
Direktur Politeknik NHI Bandung  
  
**ANWARI MASATIP**  
NIP. 197504152002121001



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	5
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	7
A.3 Basis Akuntansi	7
A.4 Dasar Pengukuran	7
A.5 Kebijakan Akuntansi	7
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	11
B.1 Pendapatan	11
B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	11
B.2 Belanja	12
B.2.1 Belanja Pegawai	13
B.2.2 Belanja Barang	13
B.2.3 Belanja Modal	14
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	16
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	16
C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas	16
C.3 Piutang Bukan Pajak	16
C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	16
C.5 Persediaan	17
C.6 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	17
C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	17
C.8 Tanah	18
C.9 Peralatan dan Mesin	18
C.10 Gedung dan Bangunan	18
C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan	19
C.12 Aset Tetap Lainnya	19
C.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	19
C.14 Properti Investasi	19
C.15 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	20
C.16 Aset Tak Berwujud	20
C.17 Aset Lain-lain	20
C.18 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	21
C.19 Utang kepada Pihak Ketiga	21
C.20 Pendapatan Diterima Dimuka	21
C.21 Uang Muka dari KPPN	21
C.22 Utang Jangka Pendek Lainnya	22
C.23 Ekuitas	22
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	23
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	23
D.2 Beban Pegawai	23
D.3 Beban Persediaan	23
D.4 Beban Barang dan Jasa	24
D.5 Beban Pemeliharaan	24
D.6 Beban Perjalanan Dinas	25
D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	25
D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi	25

D.9	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	26
D.10	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	26
D.11	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	26
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	27
E.1	Ekuitas Awal	27
E.2	Surplus (Defisit) LO	27
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	27
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	27
E.5	Transaksi Antar Entitas	27
E.6	Ekuitas Akhir	28
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	29
VI.	Lampiran dan Daftar	

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bandung, 31 Desember 2024  
Direktur Poltekpar NHI Bandung



## RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata NHI Bandung Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.879.169.938 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.879.169.938 atau mencapai 115,33 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp12.034.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp193.244.160.209 atau mencapai 94,84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp203.750.254.720.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.412.309.773.143 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp186.307.173; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.364.463.809.461 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp47.659.656.509.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp14.220.258.587 dan Rp2.398.089.514.556

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.955.521.360 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp126.740.712.177 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-113.785.190.817, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp117.611.154 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-113.667.579.663.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp2.336.577.894.690, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-113.667.579.663 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar - 4.185.790.742 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 179.364.990.271 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.398.089.514.556

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

U R A I A N	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
<b>PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>B.1</b>				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	12.034.000.000	13.879.169.938	115,33	12.682.769.567
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>12.034.000.000</b>	<b>13.879.169.938</b>	<b>115,33</b>	<b>12.682.769.567</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.2.1	43.097.666.000	38.715.498.586	89,83	33.798.881.585
Belanja Barang	B.2.2	69.928.302.000	63.805.313.011	91,24	73.692.304.975
Belanja Modal	B.2.3	90.724.286.720	90.723.348.612	100,00	134.288.983.260
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>203.750.254.720</b>	<b>193.244.160.209</b>	<b>94,84</b>	<b>241.780.169.820</b>

Bandung, 31 Desember 2024  
Direktur Poltekpar NHI Bandung



**ANWAR MASATIP**  
**NIP. 197504152002121001**

## NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	Catatan	2024	2023
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	10.019.281	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	-	25.150.019
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.2	37.380.000	182.436.024
Piutang Bukan Pajak	C.3	17.525.000	45.314.126
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.4	(87.625)	(226.571)
Persediaan	C.5	121.470.517	818.949.722
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>186.307.173</b>	<b>1.071.623.320</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.7	-	-
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.8	1.904.311.781.000	1.904.311.781.000
Peralatan dan Mesin	C.9	122.210.714.620	118.319.851.397
Gedung dan Bangunan	C.10	455.523.178.827	394.968.171.393
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.11	16.491.497.906	4.099.504.245
Aset Tetap Lainnya	C.12	2.893.925.737	2.893.925.737
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.31	7.097.257.520	8.044.989.766
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.13	(144.064.546.149)	(129.794.968.565)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>2.364.463.809.461</b>	<b>2.302.843.254.973</b>
<b>PROPERTI INVESTASI</b>			
Properti Investasi	C.14	-	0
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>-</b>	<b>0</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.15	915.187.810	910.187.810
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.16	13.541.293.667	1.654.318.435
Aset Lain-lain	C.17	38.508.073.492	35.862.637.192
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.18	(5.304.898.460)	(2.538.196.369)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>47.659.656.509</b>	<b>35.888.947.068</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2.412.309.773.143</b>	<b>2.339.803.825.361</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.19	13.797.236.265	2.842.580.671
Pendapatan Diterima Dimuka	C.20	422.003.041	383.350.000
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.22	1.019.281	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>14.220.258.587</b>	<b>3.225.930.671</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>14.220.258.587</b>	<b>3.225.930.671</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.23	2.398.089.514.556	2.336.577.894.690
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>2.398.089.514.556</b>	<b>2.336.577.894.690</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>2.412.309.773.143</b>	<b>2.339.803.825.361</b>

Bandung, 31 Desember 2024

Direktur Poltekpar NHI Bandung



ANWARI MASTA TIP  
NIP. 197504152002121001

## LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	12.955.521.360	12.532.877.266
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>12.955.521.360</b>	<b>12.532.877.266</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.2	37.786.226.634	33.695.291.960
Beban Persediaan	D.3	11.245.905.029	11.971.731.579
Beban Barang dan Jasa	D.4	37.377.634.848	44.722.172.823
Beban Pemeliharaan	D.5	5.349.358.302	3.022.376.820
Beban Perjalanan Dinas	D.6	11.360.437.666	14.999.210.535
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	23.621.124.198	17.742.551.784
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	25.500	118446
<b>Jumlah Beban</b>		<b>126.740.712.177</b>	<b>126.153.453.947</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(113.785.190.817)</b>	<b>(113.620.576.681)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.10	12.387.000	108.828.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	105.224.154	221.086.942.538
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>117.611.154</b>	<b>221.195.770.538</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(113.667.579.663)</b>	<b>107.575.193.857</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(113.667.579.663)</b>	<b>107.575.193.857</b>

Bandung, 31 Desember 2024  
Direktur Poltekpar NHI Bandung



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	Catatan	2024	2023
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	<b>2.336.577.894.690</b>	<b>2.221.294.400.972</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2	<b>(113.667.579.663)</b>	<b>107.575.193.857</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.3	<b>0</b>	<b>0</b>
	E.4	<b>(4.185.790.742)</b>	<b>(221.393.675.392)</b>
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.41	-	126.466.000
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.42	(4.185.955.188)	(220.104.063.412)
Koreksi Lain-Lain	E.43	164.446	(1.419.817.980)
<b>Jumlah</b>		<b>(4.185.790.742)</b>	<b>(221.393.675.392)</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	179.364.990.271	229.101.975.253
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		61.511.619.866	115.283.493.718
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>2.398.089.514.556</b>	<b>2.336.577.894.690</b>

Bandung, 31 Desember 2024  
Direktur Poltekpar NHI Bandung



**ANWARI MASATIP**  
**NIP. 197504152002121001**

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Politeknik Pariwisata NHI Bandung (sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi Dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Setiabudhi No. 186, Bandung. Politeknik Pariwisata NHI Bandung mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan di atas Politeknik Pariwisata NHI Bandung berkomitmen dengan visi "mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel Dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas." Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

<p><i>Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan</i></p>	<p><b>A.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN</b> Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.</p>
<p><i>Basis Akuntansi</i></p>	<p>SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP</p>
<p><i>Dasar Pengukuran</i></p>	<p><b>A.3 BASIS AKUNTANSI</b> Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.</p>
<p><i>Kebijakan Akuntansi</i></p>	<p><b>A.4 DASAR PENGUKURAN</b> Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.</p>
<p><i>Pendapatan-LRA</i></p>	<p><b>A.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI</b> Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Baparekraf yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:</p>
<p><i>Pendapatan-LO</i></p>	<p><b>(1) Pendapatan- LRA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).</li> <li>- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).</li> <li>- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.</li> </ul>
<p><i>Pendapatan-LO</i></p>	<p><b>(2) Pendapatan- LO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.</li> <li>- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.</li> <li>b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.</li> <li>c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.</li> </ul> </li> <li>- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).</li> <li>- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.</li> </ul>

Belanja

### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

#### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Muliak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
  - \* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - \* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - \* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

***Pengolongan Masa manfaat Aset Tetap***

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

**Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 12.034.000.000	Rp 12.034.000.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp 12.034.000.000</b>	<b>Rp 12.034.000.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	Rp 39.025.979.000	Rp 43.097.666.000
Belanja Barang	Rp 66.552.535.000	Rp 69.928.302.000
Belanja Modal	Rp 138.500.000.000	Rp 90.724.286.720
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 244.078.514.000</b>	<b>Rp 203.750.254.720</b>

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.879.169.938 atau mencapai 115,33 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp12.034.000.000. Pendapatan Politeknik Pariwisata NHI Bandung terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.879.169.938. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Realisasi Pendapatan sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami kenaikan disebabkan adanya pendapatan dari adanya matrikulasi untuk mahasiswa baru dengan rincian sebagai berikut :

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 12.034.000.000	Rp 13.879.169.938	115,33
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 12.034.000.000</b>	<b>Rp 13.879.169.938</b>	<b>115,33</b>

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 9,43 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

#### Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 13.879.169.938	Rp 12.682.769.567	9,43
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 13.879.169.938</b>	<b>Rp 12.682.769.567</b>	<b>9,43</b>

### B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp13.879.169.938 dan Rp12.682.769.567. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,43 % dari TA 2023. Terjadi kenaikan pendapatan pada TA 2024 sebesar 9,43 % disebabkan adanya penerimaan kembali belanja modal TAYL dan adanya kenaikan pendapatan biaya pendidikan.. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

#### Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	Rp 13.879.169.938	Rp 12.682.769.567	9,43
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 13.879.169.938</b>	<b>Rp 12.682.769.567</b>	<b>9,43</b>

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	112.812.830	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	245.108.509	226.704.500	8,12
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	69.025.000	-100,00
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	815.250.000	870.500.000	-6,35
Pendapatan Biaya Pendidikan	10.128.300.000	9.307.175.000	8,82
Pendapatan Pendidikan Lainnya	1.819.588.324	1.572.640.579	15,70
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	106.000.000	259.698.232	-59,18
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	116.485.178	155.385.426	-25,03
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	12.387.000	108.828.000	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	627.228.359	-	0,00
Pendapatan Denda Lainnya	8.822.568	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.879.169.938</b>	<b>12.682.769.567</b>	<b>9,43</b>

Realisasi Belanja  
Rp193.244.160.209

## B.2 Belanja

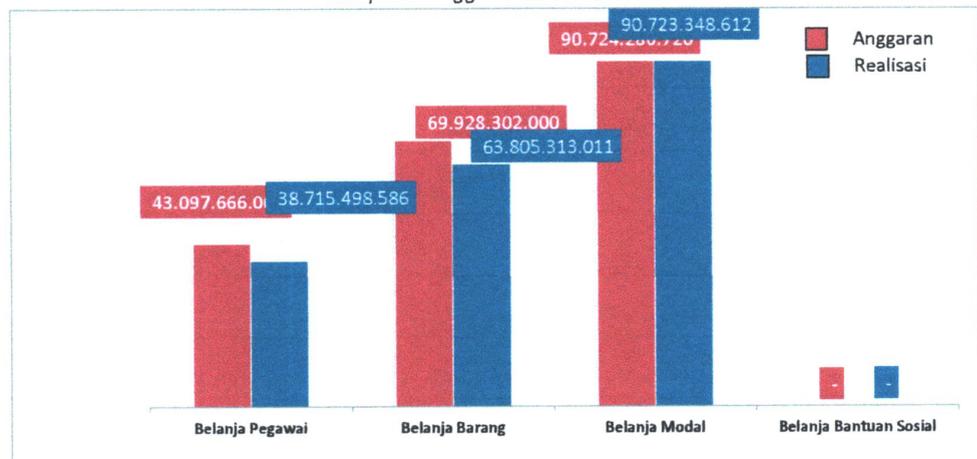
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp193.244.160.209 atau 94,84 % dari anggaran belanja sebesar Rp.203.750.254.720 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2024*

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	43.097.666.000	38.715.498.586	89,83
Belanja Barang	69.928.302.000	63.805.313.011	91,24
Belanja Modal	90.724.286.720	90.723.348.612	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>203.750.254.720</b>	<b>193.244.160.209</b>	<b>94,84</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

*Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024*



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 20,07%. Penurunan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 salah satunya disebabkan adanya kompensasi kelebihan penggunaan anggaran PNBPN pada tahun 2023 serta adanya efisiensi anggaran yang diberikan pada Tahun 2024.. Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	38.715.498.586	33.798.881.585	14,55
Belanja Barang	63.805.313.011	73.692.304.975	-13,42
Belanja Modal	90.723.348.612	134.288.983.260	-32,44
<b>Jumlah</b>	<b>193.244.160.209</b>	<b>241.780.169.820</b>	<b>-20,07</b>

Realisasi Belanja  
Pegawai  
Rp38.715.498.586

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp38.715.498.586 dan Rp33.798.881.585. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 14,55 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan Kenaikan belanja di tahun 2024 disebabkan adanya pembayaran tunjangan kinerja THR dan tunjangan kinerja ke 13 dan adanya penambahan PNS dan PPPK.

*Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	14.182.808.625	12.344.951.035	14,89
Belanja Pembulatan Gaji PNS	151.750	92.398	64,24
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	892.638.620	551.720.660	61,79
Belanja Tunj. Anak PNS	222.887.204	142.591.868	56,31
Belanja Tunj. Struktural PNS	63.000.000	43.380.000	45,23
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.160.280.000	780.035.000	0,00
Belanja Tunj. PPh PNS	147.657.703	32.760.783	0,00
Belanja Tunj. Beras PNS	546.481.320	375.280.440	0,00
Belanja Uang Makan PNS	1.370.443.000	1.472.262.000	0,00
Belanja Tunjangan Umum PNS	186.980.000	133.045.000	0,00
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4.556.353.910	4.278.874.100	0,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.006.533.580	74.447.000	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17.269	1.300	0,00
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	61.401.620	3.029.200	0,00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	20.660.200	1.211.680	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	133.160.000	10.025.000	0,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	59.239.560	3.983.100	0,00
Belanja Uang Makan PPPK	140.742.000	13.129.000	0,00
Belanja Uang Lembur	100.580.000	48.820.000	0,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Ke.	12.683.908.748	13.453.843.930	0,00
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiat	1.185.569.744	87.936.253	0,00
<b>Jumlah Belanja kotor</b>	<b>38.721.494.853</b>	<b>33.851.419.747</b>	<b>14,39</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	5.996.267	52.538.162	-88,59
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>38.715.498.586</b>	<b>33.798.881.585</b>	<b>14,55</b>

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp63.805.313.011 dan Rp73.692.304.975. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 13,42% dari Realisasi TA 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh Adanya penurunan belanja barang pada Tahun 2024 disebabkan adanya pengurangan kegiatan belanja perjalanan dinas.

*Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	11.558.848.735	13.991.401.976	-17,39
Belanja Barang Non Operasional	10.345.426.146	9.968.315.091	3,78
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.985.937.514	11.359.557.201	-3,29
Belanja Jasa	14.690.258.574	20.534.090.617	-28,46
Belanja Pemeliharaan	4.911.846.612	2.881.145.055	70,48
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.714.812.031	13.347.204.307	-19,72
Belanja Perjalanan Luar Negeri	886.550.790	2.099.682.129	-57,78
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>64.093.680.402</b>	<b>74.181.396.376</b>	<b>-13,60</b>
Pengembalian Belanja	288.367.391	489.091.401	-41,04
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>63.805.313.011</b>	<b>73.692.304.975</b>	<b>-13,42</b>

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp90.723.348.612 dan Rp134.288.983.260. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 32,44% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh Adanya penurunan belanja modal dikarenakan adanya belanja modal yang dikhususkan untuk pembangunan kampus baru dayeuhkolot..

*Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.982.030.720	28.251.621.833	-39,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.988.009.892	106.037.531.427	-31,17
Belanja Modal Lainnya	753.308.000	-	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>90.723.348.612</b>	<b>134.289.153.260</b>	<b>-32,44</b>
Pengembalian Belanja	-	170.000	-100,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>90.723.348.612</b>	<b>134.288.983.260</b>	<b>-32,44</b>

#### B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh .

*Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Realisasi Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp16.982.030.720

### B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp16.982.030.720 dan Rp28.251.621.833, mengalami penurunan sebesar 39,89 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh Adanya penurunan belanja peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2024 disebabkan adanya efisiensi dalam pembelian peralatan dan mesin..

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.982.030.720	28.251.621.833	-39,89
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>16.982.030.720</b>	<b>28.251.621.833</b>	<b>-39,89</b>
Pengembalian	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.982.030.720</b>	<b>28.251.621.833</b>	<b>-39,89</b>

Realisasi Belanja Modal  
Gedung dan Bangunan  
Rp72.988.009.892

### B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp72.988.009.892 dan Rp106.037.531.427 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami penurunan sebesar 31,17% dibandingkan Realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Penurunan belanja gedung dan bangunan disebabkan adanya tender ulang untuk pembangunan gedung dayeuh kolot..

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.772.041.677	99.656.595.200	(37,01)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan	-	-	-
Belanja Modal Perencanaan dan	9.853.790.215	5.859.456.002	68,17
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan	362.178.000	521.480.225	(30,55)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>72.988.009.892</b>	<b>106.037.531.427</b>	<b>(31,17)</b>
Pengembalian Belanja	-	170000	-100
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>72.988.009.892</b>	<b>106.037.361.427</b>	<b>(31,17)</b>

Realisasi Belanja Modal,  
Jalan, Irigasi dan  
Jaringan Rp0

### B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan Tidak terdapat belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Jaringan	0	-	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Pengembalian Belanja	0	-	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

#### B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp753.308.000 dan Rp0, sebesar % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan Adanya belanja modal lainnya yang merupakan belanja Pengadaan Material Lanskap PPNHIB TA 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Lainnya	753.308.000	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau	0	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>753.308.000</b>	-	-
Pengembalian Belanja	0	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>753.308.000</b>	-	-

#### B.2.3.4 Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan

Pendapatan Negara  
Bukan Pajak  
Rp12.955.521.360

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp12.955.521.360 dan Rp12.532.877.266. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 3,37. Hal tersebut disebabkan Adanya kenaikan pendapatan TA 2024 yang diperoleh dari biaya matrikulasi mahasiswa baru di Tahun Anggaran 2024. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	-	112.812.830	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	233.105.468	226.704.500	2,82
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	69.025.000	-100,00
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	815.250.000	870.500.000	-6,35
Pendapatan Biaya Pendidikan	10.097.550.000	9.250.321.125	9,16
Pendapatan Pendidikan Lainnya	1.694.793.324	1.743.815.579	-2,81
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	106.000.000	259.698.232	-59,18
Pendapatan Denda Lainnya	8.822.568	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.955.521.360</b>	<b>12.532.877.266</b>	<b>3,37</b>

Beban Pegawai  
Rp37.786.226.634

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp37.786.226.634 dan Rp33.695.291.960.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 12,52 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan Adanya kenaikan di belanja tunjangan kinerja yang disebabkan adanya pembayaran Tunjangan Kinerja THR dan Tunjangan Kinerja ke 13 di Tahun Anggaran 2024.. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	14.182.808.625	12.341.246.035	14,92
Beban Pembulatan Gaji PNS	144.588	91.271	58,42
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	892.638.620	551.720.660	61,79
Beban Tunj. Anak PNS	222.887.204	142.591.868	56,31
Beban Tunj. Struktural PNS	63.000.000	39.400.000	59,90
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.159.910.000	780.035.000	0,00
Beban Tunj. PPh PNS	147.657.703	32.760.783	0,00
Beban Tunj. Beras PNS	546.481.320	375.280.440	0,00
Beban Uang Makan PNS	1.372.107.550	1.447.980.450	0,00
Beban Tunjangan Umum PNS	186.980.000	132.860.000	0,00
Beban Tunjangan Profesi Dosen	4.560.078.170	4.278.874.100	0,00
Beban Gaji Pokok PPPK	1.006.533.580	74.447.000	0,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	17.269	1.300	0,00
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	61.401.620	3.029.200	0,00
Beban Tunjangan Anak PPPK	20.660.200	1.211.680	0,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	133.160.000	10.025.000	0,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	59.239.560	3.983.100	0,00
Beban Uang Makan PPPK	154.934.500	16.746.600	0,00
Beban Uang Lembur	100.580.000	48.820.000	0,00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	11.753.917.202	13.301.770.399	0,00
Beban PegawaiTunjanganKhusus/Kegiatan/Kinerja PP	1.161.088.923	112.417.074	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>37.786.226.634</b>	<b>33.582.874.886</b>	<b>12,52</b>

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.245.905.029 dan Rp11.971.731.579

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6,06 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Adanya penurunan beban persediaan yang disebabkan adanya penyesuaian kegiatan praktik mahasiswa di TA 2024.. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan konsumsi	3.621.800.793	2.910.779.338	24,43
Beban Persediaan bahan baku	7.573.351.903	8.938.088.340	-15,27
Beban Persediaan Lainnya	50.752.333	122.863.901	-58,69
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>11.245.905.029</b>	<b>11.971.731.579</b>	<b>-6,06</b>

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp37.377.634.848 dan Rp44.722.172.823.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 16,42 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Adanya penurunan beban barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 disebabkan adanya pengurangan beban belanja yang disebabkan oleh efisiensi anggaran.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	11.078.292.199	13.242.627.976	-16,34
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11.094.000	819.000	1254,58
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	384.041.400	745.990.000	-48,52
Beban Barang Operasional Lainnya	75.512.500	1.965.000	3742,88
Beban Bahan	4.147.924.626	3.503.141.017	18,41
Beban Honor Output Kegiatan	4.465.335.692	5.267.374.000	-15,23
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.729.655.828	1.181.594.074	46,38
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	0,00
Beban Langganan Listrik	1.584.141.472	1.464.660.443	8,16
Beban Langganan Telepon	18.396.864	14.336.854	28,32
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	133.861.181	80.913.602	65,44
Beban Jasa Konsultan	309.210.800	149.073.000	107,42
Beban Sewa	1.233.413.161	1.099.564.787	12,17
Beban Jasa Profesi	2.180.268.310	1.942.141.500	12,26
Beban Jasa Lainnya	9.218.045.519	15.867.855.286	-41,91
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	160.116.284	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>37.377.634.848</b>	<b>44.722.172.823</b>	<b>-16,42</b>

Beban Pemeliharaan  
Rp5.349.358.302

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.349.358.302 dan Rp3.022.376.820.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 76,99 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Terjadinya kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya peningkatan pemeliharaan peralatan dan mesin serta pemeliharaan gedung dan bangunan di Tahun Anggaran 2024. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan

*Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.390.846.333	1.226.090.710	95,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.521.000.279	1.643.793.321	53,36
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	437.511.690	142.928.489	206,11
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	9.564.300	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.349.358.302</b>	<b>3.022.376.820</b>	<b>76,99</b>

Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp11.360.437.666

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.360.437.666 dan Rp14.999.210.535

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 24,26 persen disebabkan oleh Adanya penurunan beban perjalanan dinas di Tahun Anggaran 2024 disebabkan adanya efisiensi perjalanan dinas.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	8.289.169.816	8.152.023.855	1,68
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	600.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	149.655.000	1.336.153.173	-88,80
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.098.373.420	3.491.048.977	-39,89
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	823.239.430	2.019.384.530	-59,23
<b>Jumlah</b>	<b>11.360.437.666,00</b>	<b>14.999.210.535</b>	<b>-24,26</b>

Beban Barang Untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat Rp0

#### D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp23.621.124.198

#### D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp23.621.124.198 dan Rp17.742.551.784.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.439.459.276	9.385.072.809	21,89
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.344.325.049	8.124.088.159	39,64
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	25.917.667	25.917.667	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	10.748.743	10.748.743	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	680.157.672	46.720.803	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	74.089.541	101.612.666	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	2.464.687	0,00
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>23.574.697.948</b>	<b>17.696.625.534</b>	<b>33,22</b>
Beban Amortisasi Software	45.926.250	45.926.250	0,00
Beban Amortisasi Paten	500.000	-	0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>46.426.250</b>	<b>45.926.250</b>	<b>1,09</b>
<b>Jumlah</b>	<b>23.621.124.198</b>	<b>17.742.551.784</b>	<b>33,13</b>

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Rp25.500

#### D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp25.500 dan Rp118.446

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	25.500	-	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	118.446	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>25.500</b>	<b>118.446</b>	<b>-78,47</b>

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar  
Rp12.387.000

#### D.10 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.387.000 dan Rp108.828.000

*Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	12.387.000	108.828.000	-88,62
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	0,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.387.000</b>	<b>108.828.000</b>	<b>-88,62</b>

Surplus (Defisit) dari  
Kegiatan Non  
Operasional Lainnya  
Rp105.224.154

#### D.11 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp105.224.154 dan Rp221.086.942.538.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	220.981.648.112	(100)
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	105.224.154	105.294.426	(0)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>105.224.154</b>	<b>221.086.942.538</b>	<b>(100)</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal  
Rp2.336.577.894.690,0  
0

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.336.577.894.690,00 dan Rp.2.221.294.400.972,00

Defisit LO Rp.-  
113.667.579.663,00

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.-113.667.579.663,00 dan Rp.107.575.193.857,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar Rp.0,00

### E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

### E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-4.185.790.742 dan Rp.-221.393.675.392 yaitu sebagai berikut .

Koreksi Atas  
Reklasifikasi Rp0,00

#### E.4.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.126.466.000. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Aset Tetap Non  
Revaluasi Rp-  
4.185.955.188

#### E.4.2 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-4.185.955.188 dan Rp.-220.104.063.412.

##### Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(4.190.205.188)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	4.250.000
<b>Jumlah</b>	<b>(4.185.955.188)</b>

Koreksi Lain-Lain  
Rp164.446

#### E.4.3 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.164.446 dan Rp.-1.419.817.980. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah Koreksi Lainnya disebabkan adanya penyesuaian nilai piutang PNBPNP.. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

##### Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	164.446
<b>Jumlah</b>	<b>164.446</b>

### E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.179.364.990.271 dan Rp.229.101.975.253. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

#### Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	193.244.160.209
Diterima dari Entitas Lain	(13.879.169.938)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>179.364.990.271</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

#### E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 193.244.160.209, sedangkan DDEL sebesar Rp 13.879.169.938

#### E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 terdiri dari :

#### Rincian Transfer Keluar Tahun 2024

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
0	0	0
0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
0	0	0
0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>

### E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2024

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

*Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :*

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
0	0	0
0	0	0
<b>Total Pengesahan</b>		<b>0</b>

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2024 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir  
Rp2.398.089.514.556*

### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.398.089.514.556,00 dan Rp.2.336.577.894.690,00.

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp10.019.281

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.10.019.281 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Kas di Bendahara Enhaii Hotel	1.019.281	-
Kas di GM Enhaii Hotel	9.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>10.019.281</b>	<b>-</b>

*Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :*

Kas yang terdapat di bendahara hotel dengan jumlah seluruhnya Rp.10.019.281 yang terdiri dari Rp.1.019.281 yang merupakan uang pajak sebesar Rp.533.909 & service charger sebesar Rp.485.372, selain itu Rp.9.000.000 merupakan kas yang berada di GM Enhaii Hotel atas pendapatan sewa dome kegiatan PKA di bulan Oktober 2024 yang baru disetorkan di bulan Maret 2025

Belanja Dibayar  
Dimuka (prepaid) Rp0

### C.1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp25.150.019. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

*Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	25.150.019,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>25.150.019</b>

Pendapatan yang  
Masih Harus Diterima  
Rp37.380.000

### C.2 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp37.380.000. dan Rp182.436.024. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	37.380.000	182.436.024
<b>Jumlah</b>	<b>37.380.000</b>	<b>182.436.024</b>

*Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :*

Pendapatan yang masih harus diterima diperoleh dari pendapatan pendidikan mahasiswa sebanyak 102 orang dengan tarif biaya cuti per mahasiswa per semester Rp.250.000 dan pendapatan dari tiket.com sebesar Rp.2.880.000 yang baru dibayarkan di Januari 2025

Piutang Bukan Pajak  
Rp17.525.000

### C. Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp17.525.000 dan Rp45.314.126. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Lainnya	-	23.689.126
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	17.525.000	21.625.000
<b>Jumlah</b>	<b>17.525.000</b>	<b>45.314.126</b>

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih - Piutang  
Bukan Pajak Rp87.625

### C. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp87.625 dan Rp226.571. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	%	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	17.525.000	1%	87.625
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>17.525.000</b>		<b>87.625</b>

Persediaan  
Rp121.470.517

### C. Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp121.470.517 dan Rp818.949.722. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	74.988.123	258.704.766
Bahan untuk Pemeliharaan	11.763.000	198.543.313
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	16.598.674	352.330.965
Persediaan Lainnya	13.894.179	9.370.678
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	4.226.541	-
<b>Jumlah</b>	<b>121.470.517</b>	<b>818.949.722</b>

Persediaan tersebut di atas dalam Nilai persediaan turun dari tahun anggaran sebelumnya karena penggunaan persediaan yang efektif sesuai dengan pembelajaran,

**C.1 Tanah**

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.904.311.781.000 dan Rp1.904.311.781.000. Nilai Tanah tersebut Tidak ada kenaikan nilai tanah dari tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang.. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024</b>	<b>1.904.311.781.000</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	
	-
<b>Mutasi kurang :</b>	
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>1.904.311.781.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2024*

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	1820	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II (Jl. Hegarmanah No. 95)	23.836.627.000
2	301	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	2.700.605.000
3	427	Lahan Pintu Gerbang Pos II (Jl. Dr. Setiabudhi No.186)	10.308.836.000
4	341	Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan (Jl. Radio Dayeuh Kolot)	919.659.182.000
5	40610	Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan (Jl. Dr. Setiabudhi No.186)	111.671.614.000
6	98750	Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan (Jl. Dr. Setiabudhi No.186)	271.548.188.000
7	426	Lahan Pintu Gerbang Pos II (Jl. Dr. Setiabudhi No.186)	10.284.693.000
8	201575	Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan (Citeureup Dayeuh Kolot Kab. Bandung)	554.302.036.000
<b>Jumlah</b>			<b>1.904.311.781.000</b>

**C.1 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp122.210.714.620 dan Rp118.319.851.397. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024</b>	<b>118.319.851.397</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	2.867.774.326
Transfer Masuk	15.876.000
Perolehan Lainnya	10.763.540.827
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	15.165.415.000
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Koreksi Pencatatan	989.252.731
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	14.712.099.038
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	9.220.391.161
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>122.210.714.620</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(83.690.278.334)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>38.520.436.286</b>

Mutasi transaksi penambahan dan Pengurangan peralatan mesin berupa:

- a Penambahan peralatan dan mesin berupa pembelian Rp.2.867.774.326
- b Penambahan berupa transfer Masuk senilai Rp 15.876.000,-
- c Penambahan berupa Perolehan Lainnya senilai Rp.10.763.540.827
- d Penambahan berupa Penyelesaian Pembangunan dengan KDP senilai Rp 15.165.415.000,-
- e Pengurangan pencatatan nilai berkurang sebesar Rp.14.712.099.038,-
- f Pengurangan berupa koreksi pencatatan sebesar Rp.989.252.731,-
- g Pengurangan penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp9.220.391.161

**C.1 Gedung dan Bangunan**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp455.523.178.827 dan Rp394.968.171.393. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024</b>	<b>394.968.171.393</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Jenis Transaksi	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	666.228.758
Koreksi Susulan	176.700.500
Pembelian	333.000.000
Pengembangan Melalui KDP	68.488.349.311
Pengembangan Nilai Aset	743.079.310
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4.150.957.996
Reklasifikasi Masuk	783.370.570
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	14.003.308.441
Reklasifikasi Keluar	783.370.570
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>455.523.178.827</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(56.523.825.005)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>398.999.353.822</b>

Penambahan nilai gedung dan bangunan disebabkan adanya penambahan nilai dari pengembangan melalui KDP, penyelesaian pembangunan dengan KDP, koreksi pencatatan dan koreksi pencatatan nilai berkurang dan reklasifikasi keluar

**C.1 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.16.491.497.906 dan Rp.4.099.504.245. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024</b>	<b>4.099.504.245</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Perolehan Lainnya	12.391.993.661
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
<b>Saldo per</b>	<b>16.491.497.906</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.	(3.609.125.710)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>12.882.372.196</b>

### C.1 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	2.893.925.737
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2024	2.893.925.737
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(241.317.100)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2.652.608.637

Mutasi tambah/kurang: Tidak terjadi perubahan nilai pada aset tetap lainnya

### C.: Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.7.097.257.520 dan Rp.8.044.989.766. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Penambahan KDP berasal dari Perolehan/Penambahan KDP Rp.5.122.316.192, Pengembangan KDP Rp.82.268.805.923, dan penghapusan/penghentian KDP Rp.18.895.209.149. Pengurangan KDP berasal dari Koreksi Nilai KDP Berkurang Rp.19.326.024.853, koreksi nilai pencatatan KDP Rp.68.488.349.311, penyelesaian pembangunan dengan KDP Rp.19.316.372.996. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	8.044.989.766
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	5.122.316.192
Pengembangan KDP	82.268.805.923
Penghapusan/ Penghentian KDP	-
Perolehan Lainnya KDP	18.895.209.149
Mutasi Kurang:	
Koreksi Nilai KDP Berkurang	19.326.024.853
Koreksi Pencatatan KDP	103.316.350
Pengembangan Melalui KDP	68.488.349.311
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	19.316.372.996
Saldo per 31 Desember 2024	7.097.257.520

### C.1 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp144.064.546.149 dan Rp129.794.968.565. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2024*

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	122.210.714.620	(83.690.278.334)	38.520.436.286
2	Gedung dan Bangunan	455.523.178.827	(56.523.825.005)	398.999.353.822
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.491.497.906	(3.609.125.710)	12.882.372.196
4	Aset Tetap Lainnya	2.893.925.737	(241.317.100)	2.652.608.637
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>597.119.317.090</b>	<b>(144.064.546.149)</b>	<b>453.054.770.941</b>

### C.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp915.187.810 dan Rp910.187.810. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Politeknik Pariwisata NHI Bandung berupa .

### C.1 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp38.508.073.492 dan Rp35.862.637.192. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 1 Januari 2024</b>	<b>35.862.637.192</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	9.214.443.661
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghapusan Daftar BMN Rusak Berat Yang Sudah Diusulkan ke Pengelola	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>45.077.080.853</b>
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	(4.805.948.835)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>40.271.132.018</b>

### C.1 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp5.304.898.460 dan Rp2.538.196.369. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
<b>Aset Tak Berwujud</b>			
Aset Tak Berwujud	915.187.810	(498.949.625)	416.238.185
Aset Lain-lain	38.508.073.492	(4.805.948.835)	33.702.124.657
<b>Total</b>	<b>39.423.261.302</b>	<b>(5.304.898.460)</b>	<b>34.118.362.842</b>

### C.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp13.797.236.265 dan Rp2.842.580.671. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

#### Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	124.175.910	1.053.447.862
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	131.766.688	129.313.516
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	13.541.293.667	1.659.819.293
<b>Total</b>	<b>13.797.236.265</b>	<b>2.842.580.671</b>

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang kepada pihak ketiga berasal dari beban pegawai, beban barang yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya.

**C.: Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp422.003.041 dan Rp383.350.000. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

*Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut*

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Pendapatan Diterima Dimuka	422.003.041	383.350.000
<b>Total</b>	<b>422.003.041</b>	<b>383.350.000</b>

Pendapatan diterima dimuka diperoleh dari mahasiswa baru program B sebanyak 200 orang dengan nilai Rp.2.050.000/ mahasiswa dan baru akan berkuliah di bulan Januari 2025, tetapi sudah bayar di bulan Juli 2024 dan melakukan matrikulasi selama 6 bulan dari bulan Juli sd Desember 2024 totalnya Rp.410.000.000. Selain itu pendapatan diterima dimuka dari sewa atm bank BRI dan sewa Danpac sebesar Rp.12.003.041

**C.: Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :*

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

**C.: Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.398.089.514.556, dan Rp2.336.577.894.690. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.